

# ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG PENGARUHI PAJAK DAERAH KABUPATEN EKS-KARESIDENAN SURAKARTA

Shodhik Ade Gunawan <sup>1)</sup>

Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>

Sunarti <sup>3)</sup>

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail : <sup>1)</sup>gunawanade643@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to examine the influence and analysis of PDRB, population, inflation and number of industries on the tax revenue of the ex-residency district of Surakarta. This study uses a survey method as an instrument. The population of this study is LKPD and BPS data of the Surakarta Ex-Residency District. Based on the purposive sampling method, the number of samples obtained was 35 data. This type of research used in this research is quantitative research with the aim to uncover the truth contained in this research problem with multiple regression testing and class assumption testing and data analysis to determine the quality used with the help of SPSS 25 software.*

*The results of this study indicate that partially PDRB variable, Total Population, Inflation and Number of industries affect the Local Tax Revenue. This research is expected to be able to provide useful input for regional governments to synergize with each other to further increase Regional Tax Revenues.*

**Keywords:** *PDRB, Number of Population, Inflation, Number of Industries, Receiving Local Taxes*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah melalui kebijakan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diluar pemisahan turut campur dari pemerintah pusat karena saat ini sistem pengelolaannya menganut sistem desentralisasi yaitu segala pengelolaan dan pemberian kebijakannya diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah pada saat ini. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Undang-Undang No. 18 yang ditetapkan pada tahun 1997, menyatakan bahwa pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang serasi, dinamis, nyata, dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada Daerah Tingkat II.

Fenomena dari penelitian ini adalah eks-Karesidenan Surakarta adalah Salah satu Karisiden di Jawa Tengah yang mengalami peneerimaan pajak yang tidak terlalu besar bahkan ada salah satu Kabupaten mengalami penurunan penerimaan pajak, menurut data BPS jumlah industri, jumlah, penduduk, inflas, dan PDRB yang relative sama dengan kabupaten-kabupaten di Karesidenan surakarta, akan tetapi kontribusi pajak beberapa sektor cenderung rendah dari kabupaten kabupaten di karisidenan Surakarta.

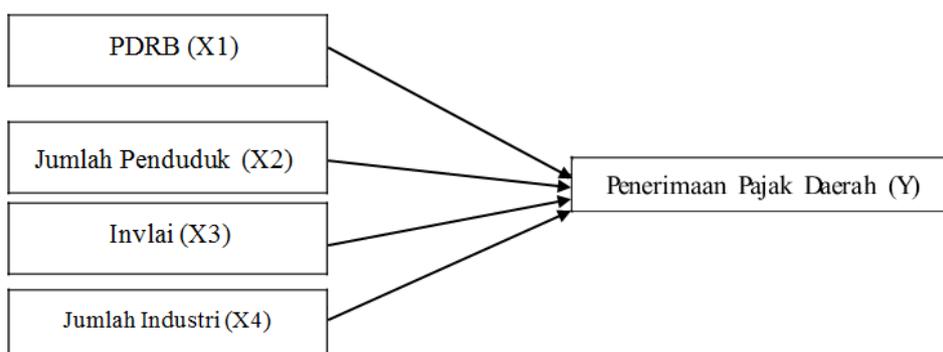
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bias membayar pajak dengan tertib dan memungkinkan daerah untuk mewajibkan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penduduk adalah seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara, dengan banyaknya penduduk pada suatu daerah maka akan semakin banyak pula perimaan pajak di suatu daerah tersebut. Semakin banyaknya jumlah industri yang berkembang, pajak daerah yang dipungut akan menikat.

Inflasi yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi jumlah penerimaan di sektor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan *output* yang cepat adalah dengan melakukan pembangunan untuk mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah. Namun hal tersebut ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian, dapat dijumpai kenaikan harga yang diperkirakan merupakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak. Pada kondisi seperti ini, pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan *output* tanpa menaikkan pajak, yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan) (Wantara, 1997).

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pajak daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pajak daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pajak daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah industri terhadap pajak daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta.

### Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Variabel bebas yang digunakan di penelitian ini meliputi PDRB, jumlah penduduk, invlasi dan jumlah industri. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pendapatan pajak daerah.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan jumlah industri.

2. Variabel dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah.

## LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak

Daerah Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan masyarakat mampu untuk membayar pajak dengan tertib dan pemerintah daerah dapat menerapkan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya, jadi semakin tinggi jumlah PDRB suatu daerah kemampuan untuk membayar pajak akan meningkat. Menurut Hijiri (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh total penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

H1: PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

### 2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah atau daerah, jika jumlah penduduk suatu daerah banyak maka akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi, jadi jika penduduk suatu daerah banyak maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada suatu daerah tersebut, jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh besar dalam penerimaan pajak Daerah Kota Cilegon. Menurut Anatoy (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Cilegon menjelaskan pengujiannya jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan sebagai subjek pajak akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pungutan pajak.

H2: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

### 3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh. Dengan adanya inflasi tidak hanya akan berpengaruh pada kenaikan harga tetapi akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang, dengan berkembang kegiatan ekonomi suatu daerah maka penerimaan pajak pun akan ikut naik. Dalam penelitian Nastiti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kabupaten Madiun.

H3: Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

### 4. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah industri suatu daerah akan mempengaruhi penerimaan pajak suatu daerah karena jika di suatu daerah terdapat banyak industri maka secara otomatis pajak yang

dibayar kan kepada pemerintah daerah akan meningkat. Losch dalam Tarigan (2005) Perusahaan besar akan meramalkan perubahan yang akan terjadi di daerah perusahaan/ industri beroperasi, sehingga industri akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka. Ketika semua faktor penentuan lokasi telah terpenuhi maka industri akan melakukan kegiatan industri di daerah tersebut. Menurut Tristano (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh jumlah industri, PDRB, dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak Daerah Kota Palembang menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah kota Palembang.  
H4 : Jumlah industri berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hipotesis dan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten kabupaten eks-Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini termasuk penelitian observasi dengan menggunakan beberapa sampel, populasi, dan menggunakan studi putaka dan studi lapangan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok.

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 80). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pemerintah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada periode 2014-2018. Seluruh data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan disetiap tahun pada periode 2014-2018.

Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dari kabupaten dan kota yang ada di eks-Karesidenan Surakarta yaitu 7 Kabupaten yang terdiri dari 5 Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) periode 2014-2018 dari setiap kabupaten yang memiliki LKPD yang berbeda. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Menurut Sugiyono (2015: 60) *non probability* sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *Non Probability Sampling* yang dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh (*sensus*) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang (Supriyanto dan Machfudz, 2010: 188).

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Lapangan**

Penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data merupakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Studi lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah yang dapat diperoleh dari laporan realisasi APBD.

## 2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka melalui literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## Definisi Operasional Variabel yang Digunakan

### 1. Pajak Daerah (Y)

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya seperti: Pajak reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran, dan lain-lain.

Pajak daerah di hitung dari besarnya pendapatan jenis-jenis pajak daerah, kewenangan pada kegiatan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

### 2. Produk Domestik Regional Bruto (X1)

Seperti yang diterangkan dalam BPS pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi residen maupun non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

$$(PDRB \text{ Pendapatan} + PDRB \text{ Pengeluaran} = PDRB \text{ Total})$$

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, serta dapat menggambarkan struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

### 3. Jumlah Penduduk (X2)

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnansi (*secular stagnation*) dalam Devas (2014) yang menerangkan bahwa bertambahnya penduduk justru akan menciptakan ataumemperbesar permintaan agegatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran.

Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

#### 4. Inflasi (X3)

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga tersebut meluas atau berdampak terhadap kenaikan barang lainnya seperti makanan, minuman, rokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan, rekreasi, transportasi, olahraga, komunikasi, dan jasa keuangan.

Inflasi dihitung dari suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu, sehingga terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi sebagai syarat inflasi menurut Boediono (2014) yaitu:

- a. Kenaikan harga, yaitu apabila harga suatu komoditas menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.
- b. Bersifat umum, yaitu kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara umum.
- c. Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum tidak akan memunculkan inflasi, jika hanya terjadi sesaat. Misalnya kenaikan harga pada saat lebaran atau tahun baru tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

#### 5. Jumlah Industri (X4)

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan menjelaskan kriteria pengelompokan industri, yaitu industri kecil, menengah, dan besar. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.

Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Semakin banyak jumlah industri yang berkembang, pajak daerah yang dipungut akan meningkat yaitu Pajak Daerah. Jumlah industri di hitung dengan cara banyaknya SIUP yang di keluarkan dinas perdagangan.

#### Teknik Analisis Data

1. Analisis deskriptif.
2. Uji Asumsi Klasik: uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas
3. Pengujian Hipotesis : analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu, Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Peran Perangkat Desa (X3) dalam variabel terkait yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Y). Rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Daerah

X<sub>1</sub> = PDRB

- X<sub>2</sub> = Jumlah Penduduk
- X<sub>3</sub> = Invlasi
- X<sub>4</sub> = Jumlah Industri
- a = Nilai Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi
- e = *random eror*

Pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Uji F
- b. Uji t
- c. Menguji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

## HASIL PENELITIAN

### 1. Analisa Deskriptif

Analisis Deskriptif yang dilakukan akan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di eks-Karesidenan Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten eks-Karisidenan Surakarta dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten eks-Karisidenan Surakarta.

PDRB Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014 – 2018 cenderung mengalami peningkatan secara terus – menerus namaun dengan kanaikan berbeda-beda. Dapat dilihat PDRB pada data BPS. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 9,55% dengan PDRB sebesar 44427890,52 juta rupiah.

Jumlah penduduk Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014 – 2018 cenderung mengalami peningkatan secara terus – menerus. Dapat dilihat jumlah penduduk pada data BPS tahun 2014-2018 sebesar 875.615 jiwa menjadi 891.068 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,07% dengan jumlah penduduk sebesar 882.090 jiwa.

### 2. Uji Asumsi Klasik

- a. Multikoleniaritas

**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikoleniaritas**

Hasil Uji	Kesimpulan
<i>Tolerance</i> ( 0,848; 0,933; 0,906; 0,961)	Tidak ada multikolinearitas
<i>VIF</i> ( 1,179; 1,072; 1,104; 1,041)	

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tidak terdapat multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai *tolerance* berada diatas 0,10 dan nilai *VIF* dibawah 10.

- b. Autokorelasi

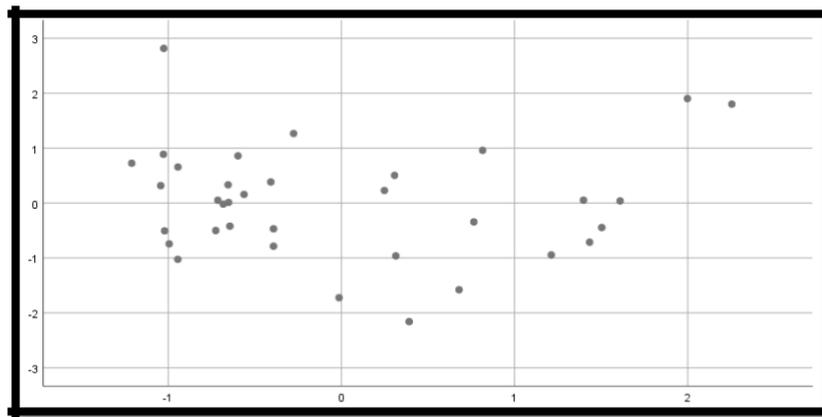
**Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi**

Hasil Uji	Kesimpulan
d ( 1,179 )	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan table “*Model Summary<sup>b</sup>*” di ketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (d) adalah sebesar 1.749, lalu nilai tabale *Durbin-Watson* dengan nilai signifikan 5% dengan rumus (K;N). Jumlah variable independen adalah 4 atau “k” = 4, sementara jumlah sampel atau “N”=35, maka (K;N)=(4;35). Dalam table *Durbin-Watson* di temukan nilai DL sebesar 1,222 dan dU sebesar 1,726 . Dapat di simpulkan nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1.749 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1726 dan kurang dari (4-du)  $4-1,726 = 2,274$  . Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji *Durbin-Watson* di atas , dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

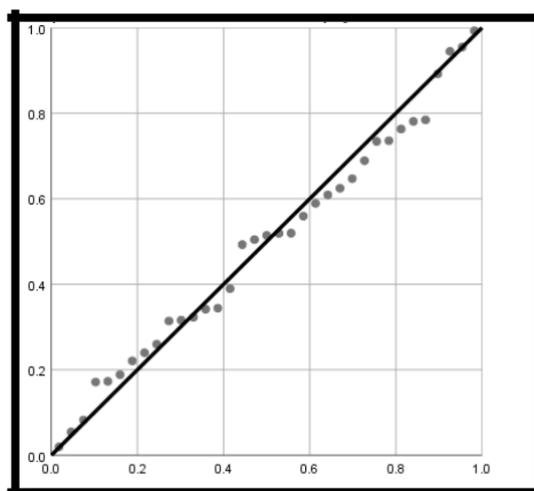
c. Heteroskedasitas



**Gambar 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitas**

Berdasarkan output *scatterplot* di atas , terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dengan *scatterplot* yang artinya bila tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Normalitas



**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan grafik histogram di atas data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

### 3. Hipotesis

#### a. Regresi Linier Berganda

**Tabel 6. Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig
constan	285.248.155.723.752	9.797	.000
PDRB X1	8.936	2.027	.052
Jumlah Penduduk X2	-272.412.710	-11.596	.000
Inflasi X3	-42.450.658.158	-2.205	.035
Jumlah Industri X4	645.894.250.472	11.130	.000
F hitung : 87.916			
Adj R Square : 0,911			

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hasil tersebut dapat dijabarkan ke dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 285.248.155.723.752 + 8.936X_1 - 272.412.710X_2 - 42.450.658.158X_3 + 645.894.250.472X_4$$

a : 285248155723.752 artinya jika PDRB (X1), Jumlah penduduk (X2), inflasi (X3), dan jumlah industry (X4) sama dengan nol, maka penerimaan pajak daerah (Y) adalah positif.

b<sub>1</sub> : 8.936 artinya ada pengaruh variabel PDRB (X1) terhadap pengelolaan penerimaan pajak daerah (Y), artinya apabila PDRB (X1) meningkat, penerimaan pajak daerah (Y) meningkat.

b<sub>2</sub>: -272412.710 artinya pengaruh variabel jumlah penduduk (X2) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) negatif, artinya apabila jumlah penduduk (X2) meningkat, maka dapat menurunkan penerimaan pajak daerah (Y).

b<sub>3</sub> : -42450658.158 artinya pengaruh variabel inflasi (X3) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) negatif, artinya apabila inflasi (X3) meningkat, maka dapat menurunkan penerimaan pajak daerah (Y)

b<sub>4</sub>: 645894250.472 artinya pengaruh variabel jumlah industri (X4) terhadap penerimaan pajak daerah(Y) positif, artinya apabila jumlah industri (X4) meningkat, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah (Y).

#### b. Hasil uji t

- 1) Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2.027 dengan *p-value* sebesar 0,052 > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan PDRB (X1) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa: "Ada pengaruh yang signifikan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta", ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.
- 2) Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -11.596 dengan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan

jumlah penduduk ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks- Karesidenan Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh positif signifikan jumlah penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta”, ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.

- 3) Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -2.205 dengan *p-value* sebesar  $0,035 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara inflasi ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-3 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh positif signifikan inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta”, ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.
- 4) Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 11.130 dengan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara jumlah industri ( $X_4$ ) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-4 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh positif signifikan jumlah industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta”, diterima atau terbukti kebenarannya.

#### c. Hasil uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 87,916 dengan *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu PDRB ( $X_1$ ), jumlah penduduk ( $X_2$ ), inflasi ( $X_3$ ), dan jumlah industri ( $X_4$ ) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Surakarta.

#### d. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* =  $0,921 = 92\%$  berarti diketahui bahwa pengaruh / sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas yaitu PDRB ( $X_1$ ), jumlah penduduk ( $X_2$ ) inflasi ( $X_3$ ) dan jumlah industri ( $X_4$ ) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta sebesar 92,1% sedangkan sisanya ( $100\% - 92,1\%$ ) = 7,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang tidak diteliti.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2.027 dengan *p-value* sebesar  $0,052 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  di tolak berarti tidak pengaruh signifikan PDRB ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta, dengan demikian hipotesis satu ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa: “PDRB berpengaruh positif signifikan dalam Penerimaan Pajak Daerah”, ditolak atau tidak terbukti kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y). Pengujian variabel PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa semakin tingginya PDRB pada suatu daerah akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung Penelitian menurut Tristanto (2015) PDRB pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang, jumlah PDRB di eks-karesidenan

Surakarta tidak mengalami peningkatan yang terlalu besar jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. (Data BPS).

## **2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta**

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -11.596 dengan p-value sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh negatif yang signifikan jumlah penduduk (X2) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta, dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa: “jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan dalam Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta”, ditolak atau tidak terbukti kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta. Pengujian variabel jumlah penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk suatu daerah maka akan membuat penerimaan pajak daerah menurun.

Hasil penelitian ini belum mendukung penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan karena pada penelitian terdahulu terdapat pengaruh positif dan tidak berpengaruh. Hampir separuh dari penduduk adalah penduduk yang berusia non produktif sehingga akan berimbas pada Pertumbuhan PDRB dan naiknya inflasi dan mengurangi penerimaan pajak daerah. (Data BPS).

## **3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta**

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -2.205 dengan p-value sebesar  $0,035 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh negatif yang signifikan inflasi (X3) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa: “inflasi berpengaruh positif signifikan dalam Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta”, di tolak atau tidak terbukti kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Pengujian variabel inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi pada suatu daerah maka akan menurunkan Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian aritanto (2014) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan pada penerimaan pajak daerah kota Surabaya. Jika inflasi yang tinggi akan berimbas pada harga produksi naik dan membuat industri merugi dan tutup sehingga akan mengurangi penerimaan pajak daerah. (Nopirin 2010).

## **4. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta**

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 11.130 dengan p-value sebesar  $0,00 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh positif yang signifikan jumlah industri (X4) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta, dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa: “jumlah industri berpengaruh positif signifikan dalam Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten eks-Karesidenan Surakarta”, diterima atau terbukti kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah industri berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Pengujian variabel jumlah industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan bahwa semakin banyaknya industri pada suatu daerah maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Jika suatu daerah memiliki industri yang banyak maka akan meningkatkan pendapatan pajak daerah sebab industri akan membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian anatoly (2018) menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh positif signifikan pada penerimaan pajak daerah kota Cilegon.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah secara persial, sedangkan jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, dengan begitu pemerintah daerah perlu meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, P. S. (2014), "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3, p. 1-16.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, Sragen Dalam Angka Tahun 2014 sampai dengan 2018.
- Boediono. 2014. *Pajak Indonesia*. Diadit Media. Yogyakarta.
- Devas, Nick. 2014. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Ghozali, I. 2015. *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-4. Salemba Empat. Jakarta.
- Kaho, Josef R. 2014. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Perpajakan*. Edisi ke-7. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mudrajad, Kuncoro. 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Nastiti, C. R. 2015. "Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 4, p. 1-19.
- Nanga, Muana. 2015. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Pertama. Rajawali Press. Jakarta.
- Nopirin. 2014. *Ekonomi Moneter*. BPF. Yogyakarta.
- Pajak Daerah (studi kasus di Kota Kediri). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang.
- Nopirin. 2014. *Ekonomi Moneter*. Buku I. Edisi ke empat. Cetakan Ke tujuh. BPF UGM. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sarwoko. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Thomas, Sumarsan. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Esia Media. Jakarta
- Todaro. 2014. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2009, pasal 1 ayat-10.